

**PERDAGANGAN INTERNASIONAL
SEKTOR PETERNAKAN**

Oleh:

Achmad Firman, SPt., MSi

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
PEBRUARI 2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian Mandiri

1.	a. Judul Penelitian	:	
	“Perdagangan Internasional Sektor Peternakan”		
	b. Bidang Ilmu	:	Pertanian/Ekonomi Peternakan

2.	Peneliti		
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Achmad Firman, SPt., MSi
	b. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	c. Gol/Pangkat/NIP	:	IIIb/Penata TK I/132 297 365
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor
	e. Jabatan Struktural	:	-
	f. Fakultas/Jurusan	:	Peternakan/Sosial Ekonomi Peternakan
	g. Pusat Penelitian	:	Universitas Padjadjaran

3.	Lokasi Penelitian	:	Indonesia
----	-------------------	---	-----------

4.	Kerjasama dengan institusi lain	:	Tidak ada
----	---------------------------------	---	-----------

5.	Sumber Dana	:	-
----	-------------	---	---

Bandung, Pebruari 2007

Mengetahui
Kepala Laboratorium Ekonomi

Peneliti

Ir. Sri Rahayu, MS
NIP: 130 703 522

Achmad Firman, SPt., MSi
NIP: 132 297 36

PENDAHULUAN

Bila kita perhatikan, terjadinya migrasi manusia dari satu negara ke negara lainnya, pencarian wilayah atau negara yang kaya akan sumber daya, dan imperialisme di masa lampau didasari oleh kebutuhan manusia yang semakin meningkat, akan tetapi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas dan langka (*scarcity*). Oleh karena itu, banyak negara-negara di dataran eropa (misalnya Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol) mencari wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pertemuan antar bangsa pun tidak dapat dielakkan lagi sehingga terjadi interaksi dari masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dari negara eropa. Transaksi perdagangan pun dimulai, baik dengan cara barter ataupun dengan menggunakan mata uang yang disepakati. Bahkan untuk mempertahankan pasokan atau suplai sumber daya tersebut ke wilayah eropa, maka banyak diantara negara-negara tersebut menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya.

Cerita di atas hanya memberikan ilustrasi bahwa perdagangan internasional mulai terjadi saat kebutuhan manusia semakin meningkat dan diperlukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejalan dengan perjalanan waktu, perkembangan dunia yang terus berkembang, baik dari sisi jumlah populasi penduduk, meningkatnya kebutuhan dasar manusia, teknologi, maupun informasi, maka antara negara yang satu dengan negara yang lain adanya saling keterkaitan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya keterkaitan tersebut, maka perdagangan antar negara sangat diperlukan. Alasan lain di mana suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain adalah karena setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara mempunyai sumber daya yang berbeda-beda baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara dan kesejahteraan rakyat negara tersebut. Di samping itu, sistem perdagangan internasional pun sudah semakin modern seiring dengan perkembangan waktu di mana dulu perdagangan dilakukan dengan cara barter, sekarang dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan perangkat teknologi yang canggih.

Persaingan di tingkat global sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Perdagangan di dunia terus berjalan seiring dengan waktu dan berbagai pola perdagangan yang ditimbulkannya, yaitu adanya berbagai hambatan dalam perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif, kuota, atau proteksi, *bioterorism act*, dan sebagainya. Tujuan hambatan-hambatan tersebut adalah untuk melindungi berbagai kepentingan suatu negara, baik konsumen maupun produsen lokal. Aturan perdagangan internasional pun terus dibentuk guna membebaskan dari sekat-sekat hambatan perdagangan melalui kesepakatan perdagangan bebas melalui organisasinya yang disebut dengan *World Trade Organization* (WTO).

Berdasarkan uraian di atas, perdagangan internasional sangat penting guna meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk yang diperdagangkan, termasuk komoditas-komoditas agribisnis. Oleh karena itu, dibagian ini akan dibahas mengenai perdagangan internasional dan ekspor-impor sebagai bahan untuk memperluas pandangan tentang sistem agribisnis. Beberapa sub pokok bahasan yang akan dibahas pada bab ini adalah teori perdagangan internasional, dampak perdagangan internasional, pembatasan perdagangan internasional, dan ekspor-impor.

TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Beberapa pola perdagangan membutuhkan sedikit penjelasan. Misalnya, saat ini kebutuhan daging sapi yang beredar dipasaran di Indonesia, tidak hanya berasal dari sapi lokal tetapi juga berasal dari sapi-sapi asal Australia atau yang dikenal dengan istilah *Australian Commercial Cross* (ACC). Hampir setiap tahun Indonesia mengimpor sapi bakalan asal Australia kurang lebih sebanyak 300.000 ekor pertahun. Sungguh merupakan jumlah yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan daging nasional. Di sisi lain, ada beberapa komoditas perkebunan yang menjadi andalan Indonesia untuk di jual ke mancanegara, seperti kakao, kelapa sawit, kopi dan sebagainya.

Berdasarkan ilustrasi di atas, tampak jelas bahwa adanya pertukaran barang dari dalam negeri ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri (*world market*) disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang diungkapkan oleh Caves, dkk (1993):

- Adanya kebutuhan permintaan terhadap barang dan jasa dari dalam negeri
- Adanya kelebihan suplai atau produksi dari dalam negeri
- Adanya efisiensi biaya yang menyebabkan nilai harga barang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran internasional
- Teknologi yang mendukung efisiensi teknis sehingga dapat mengurangi biaya produksi
- Tingkat keahlian tenaga kerja
- Skala usaha yang besar yang membawa pada rendahnya biaya

Atau secara singkat, motivasi terjadinya pola perdagangan internasional disebabkan oleh dua hal, yaitu:

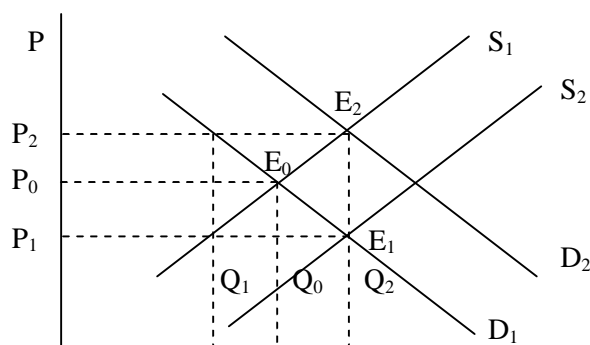
1. Migrasi suatu sumber daya dari suatu negara ke negara lain disebabkan oleh adanya peningkatan harga
2. Adanya perbedaan biaya yang rendah dari sumber daya dari suatu negara dengan negara lain sehingga ada sisi keuntungan yang dapat diperoleh dengan menjual barang tersebut ke negara lain.

Teori Permintaan dan Penawaran Dalam Perdagangan Internasional

Seperti yang diungkapkan oleh Caves, dkk., (1993) dan Salvabre, (1995), berbagai teori yang berkaitan erat dengan perdagangan internasional adalah teori keuntungan absolut (*absolute advantage*) oleh Adam Smith, teori keuntungan komparatif (*comparative advantage*) oleh John Stuart Mill dan diikuti sesudahnya oleh Ricardo dengan teori biaya relative (*relative cost*). Semua teori tersebut digolongkan dalam teori klasik dalam perdagangan internasional, seperti yang telah diuraikan di atas. Mengingat perkembangan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, maka munculah berbagai teori-teori baru yang dikenal dengan teori modern perdagangan internasional diantaranya adalah teori faktor proporsi (*factor of proporsion*) oleh Heckscher-Ohlin atau yang lebih dikenal dengan teori H-O dan teori *oppportunity cost* oleh Harberlel. Namun pada akhirnya perdagangan internasional terjadi karena ada proses penawaran dan permintaan.

Pada dasarnya perdagangan internasional terjadi karena ada aliran barang dari negara mempunyai akses *supply* (penawaran) ke negara yang mempunyai akses *demand* (permintaan). Proses inilah menyebabkan terjadinya suatu transaksi perdagangan antar satu negara dengan negara yang lain. Tujuan dari transaksi perdagangan tersebut tidak lain adalah bagi negara pengimpor dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih

rendah dibanding harus memproduksi sendiri barang tersebut sedangkan keuntungan bagi negara pengekspor adalah ia dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan devisa. Selain itu, tujuan dari utama dari adanya perdagangan internasional ini adalah meningkatkan kesejahteraan dari kedua negara. Oleh karena itu, pada perdagangan internasional akan terjadi proses perubahan pada kurva penawaran dan permintaan yang mengakibatkan adanya perubahan pada harga dan produksi barang.



Gambar 2. Perubahan Kurva Permintaan dan Penawaran Perdagangan Internasional terhadap Ekonomi Nasional

Pada Gambar 2., diperlihatkan pengaruh perdagangan internasional terhadap harga dan produksi yang digambarkan oleh kurva penawaran dan permintaan. Pada kondisi pertama, bila demand tetap (D_1) sedangkan impor (M) naik maka kurva *supply* (S_1) akan bergeser ke kanan bawah (S_2) sehingga harga menjadi turun menjadi dari P_0 ke P_1 yang disebabkan oleh produk yang beredar di dalam negeri meningkat karena ada produk dari impor. Sementara itu produksi dalam negeri menjadi turun menjadi Q_1 karena tersaing barang impor sehingga titik keseimbangan bergeser dari E_0 ke E_1 . Pada kondisi kedua, bila demand luar negeri meningkat dari D_1 ke D_2 , dan diasumsikan *supply* (S_1) tidak mengalami perubahan, maka terjadi peningkatan harga dari P_0 ke P_2 . Hal ini memberi dampak pada peningkatan produksi dalam negeri dari Q_0 ke Q_1 karena ada daya tarik harga yang cukup bagus di pasar internasional sehingga keseimbangan bergeser dari E_0 ke E_2 .

Oleh karena itu, aktivitas ekonomi perdagangan internasional yang diwujudkan dalam kegiatan ekspor dan impor akan mempengaruhi ekonomi nasional suatu negara. Bila nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impornya dari suatu negara, maka negara tersebut mengalami surplus dalam neraca perdagangan luar negrinya. Namun sebaliknya bila nilai impornya lebih tinggi dari nilai ekspornya, maka negara tersebut mengalami defisit dalam neraca perdagangannya dan juga berpengaruh pada penurunan GNP (*Gross National Product*) negara tersebut.

DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan Bebas

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa perdagangan internasional merupakan komponen penting bagi perekonomian suatu negara. Hal ini didasarkan atas adanya keterkaitan dan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun sebenarnya ada dua alasan utama terjadinya perdagangan internasional, yaitu:

- a. Adanya perbedaan dan keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia,
- b. Untuk meningkatkan skala ekonomi, yaitu dengan memperbesar sejumlah barang tertentu dibandingkan dengan negara tersebut harus memproduksi segala jenis barang di dalam negeri.

Ke dua alasan di atas menyebabkan masing-masing negara melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas atas barang dan jasa yang tersedia guna dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan perdagangan tersebut. Atau dengan istilah lain bahwa setiap negara berusaha untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar internasional.

Para ekonom umumnya mengartikan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sebagai hasil gabungan antara keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan kegagalan pasar (*market distortion*), baik yang terjadi karena kebijakan pemerintah maupun karena ketidaksempurnaan pasar (Sharples, 1990). Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) adalah keunggulan produk satu negara dibandingkan produk yang sama dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dapat terjadi suatu produk memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional akibat adanya dukungan kebijakan proteksi pemerintah, walaupun sebenarnya produk tersebut tidak memiliki komparatif. Sebaliknya, dapat pula terjadi suatu produk memiliki keunggulan komparatif, namun karena tingginya kegagalan pasar akibat struktur pasar yang tidak bersaing sempurna, misalnya tingginya biaya transaksi, menyebabkan produk tersebut menjadi tidak memiliki keunggulan kompetitif atau rendah daya saingnya.

Dengan demikian, liberalisasi perdagangan mengisyaratkan harga produk yang memiliki keunggulan komparatiflah yang dapat memiliki keunggulan kompetitif. Lebih jauh perlu diingat bahwa keunggulan komparatif pada dasarnya berasal dari keunggulan statik akibat adanya bawaan faktor (*factor endowment*), baik berupa sumberdaya alam (*natural resources*) maupun sumberdaya manusia, yang relatif melimpah, dan atau keunggulan pembelajaran (*learning advantage*). Keunggulan kedua inilah yang menyebabkan keunggulan komparatif yang bersifat dinamik khususnya perkembangan teknologi yang menghasilkan produk yang efisien. Menurut Salvatore, 1995 bahwa keunggulan teknologi menyebabkan tiga hal penting, yaitu:

- a. Kemajuan teknik yang menghemat modal dalam perekonomian akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja,
- b. Kemajuan teknik yang menghemat buruh,
- c. Kemajuan teknik netral dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal dengan proporsi yang sama.

Dengan kondisi demikian mau tidak mau atau suka tidak suka, maka suatu negara harus meningkatkan kualitas sumberdayanya agar dapat bersaing di pasar internasional. Indonesia misalnya memiliki sumberdaya yang melimpah baik sumber daya alamnya maupun sumberdaya manusianya. Namun bila sumberdaya tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik (dilihat dari sisi keunggulan komparatif dan kompetitifnya), maka konsekuensinya adalah tidak akan mampu bersaing di pasar dunia.

Oleh karena itu, apabila suatu negara tidak dapat menghasilkan suatu produk yang dapat bersaing di pasar dunia, maka produknya akan kalah bersaing dengan negara lainnya. Inilah yang mendasari adanya praktek proteksionisme dari suatu negara terhadap suatu produk impor. Pada dasarnya, tujuan proteksi tersebut dilakukan untuk melindungi produk-produk domestik agar tetap bertahan di pasaran domestik. Berbagai praktek yang dilakukan adalah pembatasan impor produk (*quota*), memberikan tarif impor yang cukup tinggi, serta hal-hal lain yang menyebabkan produk impor tersebut

mempunyai harga lebih tinggi dibandingkan dengan produk domestik yang sejenis. Kondisi yang sama juga akan dilakukan oleh negara pengimpor terhadap negara yang melakukan proteksi atas produk-produknya. Tindakan proteksi memproteksi antar suatu negara dikenal dengan *retaliiasi*.

Kondisi-kondisi yang tidak kondusif tersebut menyebabkan beberapa negara melakukan kesepakatan untuk melakukan perdagangan yang bebas dari hambatan-hambatan perdagangan. Namun liberalisasi perdagangan ini mendapat berbagai tentangan dari negara-negara yang kurang maju (*Less Developed Countries, LCD*) karena liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan negara-negara yang sudah maju (*Developed Countries*). Sehingga negara-negara LCDs mengusulkan Tata Ekonomi Internasional Baru (*New International Economic Order, NIEO*) yang meliputi peningkatan harga untuk ekspor tradisional mereka, stabilisasi ekspor, peningkatan bantuan luar negeri, perlakuan khusus bagi manufaktur ke negara DCs dan pembaharuan sistem moneter internasional yang lebih memperhatikan kepentingan LDCs. Akhirnya perdagangan bebas dilakukan secara bertahap sebelum perdagangan bebas di tingkat dunia diberlakukan, yaitu di mulai di tingkat regional (seperti AFTA), benua (seperti APEC) dan pada akhirnya di tingkat dunia (GATT/WTO) yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Isu Lingkungan Berkelanjutan

Sejalan dengan perdagangan internasional yang cukup dinamis, pada dekade 1990-an, isu lingkungan terhadap produk-produk yang diperdagangkan menjadi isu yang sangat penting. Pada isu lingkungan ini dititikberatkan apakah produk yang dihasilkan merusak lingkungan atau tidak. Isu ini muncul karena beberapa negara, khususnya negara-negara berkembang, melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alamnya secara besar-besaran tanpa mengindahkan dampak kerusakan lingkungan atau *sustainablelity*. Dampak dari isu tersebut adalah produk-produk negara berkembang tidak dapat diterima di pasar internasional. Bila produk suatu negara dapat diterima di pasaran internasional, maka produk tersebut harus mendapatkan sertifikasi dari organisasi internasional bahwa produknya ramah lingkungan. Isu lingkungan inilah yang mendasari adanya hambatan non tarif di bidang lingkungan yang selanjutnya akan dibahas pada bagian selanjutnya. Namun sebelum membicarakan mengenai isu lingkungan lebih jauh, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar hambatan perdagangan yang akan diterangkan pada bagian berikut ini.

Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Nasional

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya perdagangan internasional dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Bila diklasifikasikan, dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional terbagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif (Agoes Moerjono, 1993). Dampak positif dari perdagangan internasional adalah:

1. Meningkatkan investasi yang bersumber dari investor asing ataupun lokal.
2. Meningkatkan devisa karena bila nilai ekspor melebihi dari nilai impor, maka net eksport bernilai positif dan akan menjadi devisa negara.
3. Menimbulkan lapangan pekerjaan karena dengan adanya perdagangan internasional terjadinya perluasan usaha yang akan menyerap tenaga kerja.

4. Meningkatkan daya saing produk berdasarkan keunggulan komparatif melalui efisiensi teknis dengan cara menurunkan biaya produksi dengan penggunaan teknologi.
5. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang handal karena dengan adanya perdagangan internasional akan terjadi tukar menukar informasi dan teknologi sehingga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
6. Memperluas diversifikasi barang, jasa dan pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan
7. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan adanya perdagangan internasional adalah:

1. Terpengaruhnya perekonomian nasional oleh situasi dan kondisi pasar dunia. Apabila kita tidak merespon situasi pasar dunia, maka kita akan ditinggalkan oleh negara-negara lain.
2. Berpengaruh pada perubahan terhadap kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan apabila pengaruh global tersebut berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Contoh kongkrit saat Indonesia dilanda krisis ekonomi yang dimulai pertengahan tahun 1997 sebagai dampak dari jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat.
3. Menciptakan ketergantungan produk terhadap suatu negara, contoh misalnya kekurangan suplai daging di Indonesia dipenuhi dari impor sapi dari Australia dan sampai sekarang kita masih tergantung pada Australia
4. Eksploitasi terhadap sumber daya karena untuk memenuhi permintaan pasar dunia, misalnya eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan
5. Terbentuknya proteksi non tarif yang dapat menghambat produk ekspor karena proteksi non tarif biasanya ditetapkan oleh suatu negara agar produk negara lain sangat sulit untuk masuk negara tersebut.

SISTEM EKSPOR – IMPOR

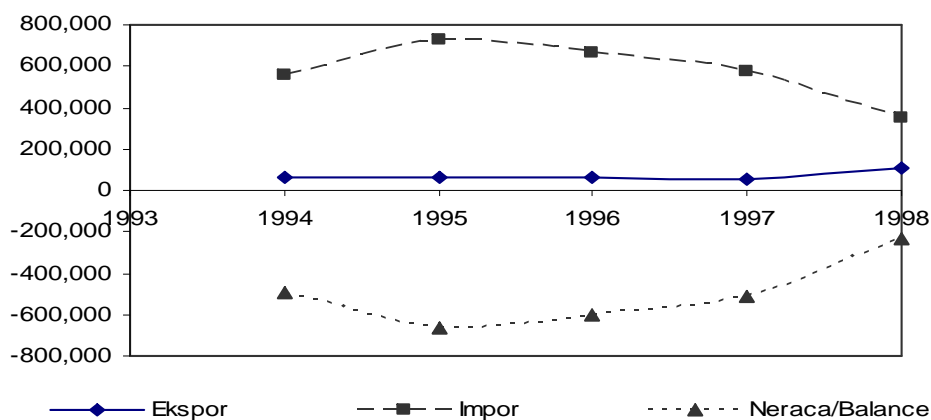
Dorongan untuk Ekspor

Belajar dari pengalaman krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Tahun 1997, di mana seluruh sektor terpuruk akibat krisis yang disebabkan turunnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sebelum tahun 1997, kebanyakan industri di Indonesia lebih banyak menggunakan bahan baku impor (*import content*) untuk produk-produk yang dipasarkan di Indonesia karena saat sebelum tahun 1997 nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hanya sebesar Rp 2.500/US\$. Namun, saat krisis ekonomi terjadi penurunan nilai rupiah yang cukup drastis, yaitu rata-rata sebesar Rp 8.740/US\$. Hal ini berdampak pada membengkaknya nilai pembelian perusahaan lokal terhadap barang-barang yang diimpor dari perusahaan luar negeri. Namun disisi lain, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah tersebut. Beberapa sektor yang menjadi primadona adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan galian.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka jelaslah bahwa kita harus berusaha untuk meningkatkan ekspor dari sumber daya yang kita miliki agar hasil yang diperoleh dapat meningkatkan cadangan devisa bagi negara, untuk melaksanakan pembangunan, dan

membayar hutang plus dengan bunganya yang telah dipinjamnya untuk pembangunan. Namun, permasalahan yang sering terjadi di negara-negara berkembang adalah mereka belum mampu dan belum mempunyai standar dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkannya. Selain itu, barang-barang yang diproduksi seringkali masih bersifat produksi primer atau masih berupa bahan baku sehingga nilai jualnya masih cukup rendah dibandingkan dengan barang-barang yang telah mengalami pengolahan atau produk turunannya. Biasanya, negara-negara maju sering melakukan impor bahan baku dari negara-negara berkembang, yang selanjutnya mereka olah menjadi berbagai produk olahan yang kemudian produk tersebut kembali mereka jual ke negara-negara berkembang dengan harga yang relatif tinggi.

Salah satu ilustrasi yang dapat ditampilkan dari kegiatan ekspor impor dari subsektor peternakan dari tahun 1994 – 1998 dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan ilustrasi pada gambar tersebut, tampak bahwa nilai ekspor dari produk peternakan lebih rendah dibandingkan dengan nilai impornya sehingga menyebabkan neraca pembayaran menjadi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk peternakan lebih banyak menggunakan bahan baku impor dibandingkan dengan bahan baku impor. Contoh kongkrit misalnya, bibit ayam (*grand parents stocks*) masih didatangkan dari luar negeri, banyak sekali sapi sapi penggemukan didatangkan dari Australia, dan sebagainya.



Sumber: Ditjen Peternakan, 1999 (Dikutip dari Achmad Firman, 2001)

Gambar 4. Ekspor Impor Komoditas Peternakan Tahun 1994 – 1998

Berkaca dari kondisi di atas, maka kita harus berupaya mencari sumber-sumber daya lokal yang dapat diolah menjadi produk-produk yang mempunyai nilai tinggi sehingga dapat diekspor ke mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi, mendorong, memberikan kemudahan, dan mempermudah sistem ekspor bagi para pengusaha dalam negeri yang akan melakukan ekspor. Keaktifan Indonesia dalam perdagangan internasional ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1982 yang mengisyaratkan bahwa Indonesia harus melakukan perdagangan internasional secara aktif sesuai dengan situasi pasar. Bahkan Indonesia pun mencatatkan dirinya dalam dunia perdagangan bebas dan menjadi anggota WTO sekarang ini.

Prosedur dan Dokumentasi Ekspor

Sesuai dengan tujuannya bahwa ekspor adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk yang kita hasilkan. Tentunya nilai tambah yang diharapkan dari produk-produk yang diekspor dinilai dengan keuntungan yang akan kita peroleh dari hasil ekspor. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, beberapa hal yang menjadi syarat terhadap barang-barang yang akan diekspor, seperti barang tersebut berkualitas, sesuai dengan standar internasional, dan memenuhi berbagai persyaratan non tarif lainnya, maka barang-barang tersebut dapat diekspor ke negara yang dituju. Sedangkan bila dikaitkan dengan perusahaan yang akan melakukan ekspor, tentunya ada beberapa hal yang perlu dimiliki:

1. Tercatat sebagai perusahaan perseroan terbatas (P.T.) yang memiliki izin ekspor atau bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki izin ekspor.
2. Kemampuan perusahaan dari segi keuangan, produksi, organisasi, personalia, manajemen, dan sebagainya.
3. Tidak tercatat sebagai perusahaan *black list* oleh Bank Central (Bank Indonesia) karena ketidakmampuan membayar hutang ke pihak-pihak terkait.

Sebagai perusahaan pengeksportir tentunya tidak akan terlepas dengan adanya resiko yang akan dihadapi. Berbagai kendala yang akan dihadapi sebagai perusahaan pengeksportir, yaitu:

1. Kalah bersaing. Kekalahan eksportir dalam persaingan di pasar negara tujuan bisa disebabkan oleh barang yang diekspor tidak diterima oleh pasar, harga dan ketentuan penjualan yang ditawarkan oleh eksportir tidak kompetitif, jalur distribusi maupun perantara yang dipergunakan tidak efektif dan tidak efisien, atau *sales promotion* yang digunakan kurang tepat sasaran.
2. Kehilangan akses sebagai akibat dari perubahan peraturan di luar negeri, misalnya adanya *trade barrier* (hambatan perdagangan) oleh negara tujuan.
3. Perubahan peraturan dalam negeri, misalnya adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengekspor produk-produk setengah jadi dan jadi bukan produk bahan baku. Contoh pada ekspor rotan yang mengharuskan ekspor produk jadi.
4. Kesulitan transit barang atau dokumen. Eksportir mengalami kerugian karena terhambatnya pengapalan atau pengiriman dokumen atau barang ke negara tujuan karena adanya perang, kekacauan, atau pemberontakan di negara transit.
5. Resiko kerugian dari perubahan nilai kurs. Biasanya antara eksportir dan importir telah bersepakat untuk melakukan pembayaran dengan nilai kurs tertentu, namun apabila terjadi penguatan atau penurunan nilai dollar Amerika Serikat terhadap seluruh nilai mata uang, maka akan berdampak pada perdagangan tersebut.
6. Resiko jangka waktu pembayaran. Lamanya jangka waktu pembayaran dapat menyebabkan kerugian bagi eksportir karena terkait dengan masalah harga dan atau suku bunga bank yang harus ditanggung oleh eksportir dan juga menyangkut resiko politik, ekonomi, dan keuangan dari negara importir. Kasus yang sering terjadi adalah adanya penundaan pembayaran oleh negara importir sehingga menyebabkan roda keuangan perusahaan eksportir akan terhambat juga.

Oleh karena itu, beberapa hal penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian dari eksportir, yaitu:

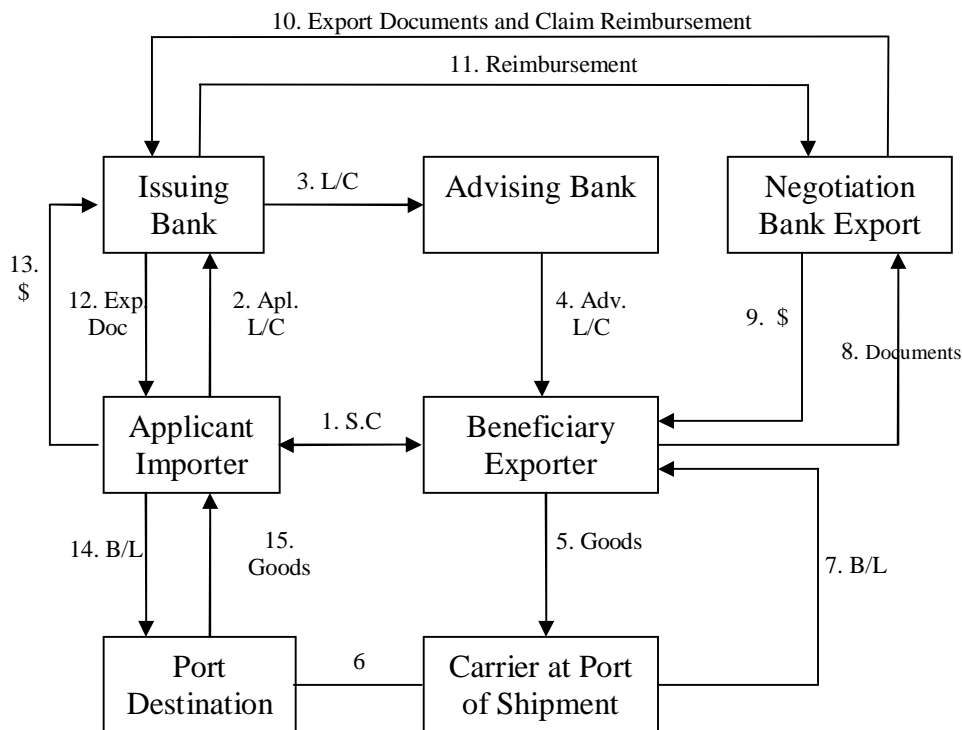
1. *Commercial Credit Risk*, yaitu resiko yang timbul dari karakter pihak yang harus membayar atau menerima barang yang diperdagangkan. Misalnya, pihak importir tidak mau membayar barang yang diimpornya karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, maka pihak eksportir dapat memberikan diskon terhadap barang-barang tersebut.

2. *Financial Risk*, yaitu resiko ketidakmampuan importir untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang diimpor karena adanya masalah keuangan perusahaan. Untuk mengantisipasinya, maka eksportir bisa menggunakan sistem pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)* dimana yang melakukan pembayaran terhadap eksportir adalah pihak bank dimana importir berada.

Berkaitan dengan proses ekspor suatu komoditas ke negara lain, pihak perusahaan pengekspor harus memenuhi segenap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ekspor. Yang dimaksud dengan dokumentasi ekspor adalah penyusunan dokumen yang dimulai sejak terjadinya kesepakatan antara eksportir dengan importir. Beberapa hal yang terkait dengan dokumentasi ekspor adalah sebagai berikut (Agoes Moerjono, 1993):

1. *Shipping Documents / Transport Documents*, yaitu dokumen yang menyatakan adanya kontrak pengangkutan barang antara pemilik barang (*shipper*) dengan pengangkut barang atau ekspedisi (*carrier*). Dokumen tersebut dapat berupa dokumen pengangkutan oleh kapal laut, kapal terbang atau bisa juga sekadar tanda terima barang yang diterbitkan pihak pengangkut atau pengirim barang. Sedangkan *Transport Document* dapat berupa *on board bill of lading*, yaitu dokumen yang bisa berlaku sebagai dokumen pemilik barang yang dapat diperjualbelikan.
2. *Commercial Documents* yang terdiri dari:
 - a. *Commercial Invoice* yaitu dokumen yang dibuat eksportir yang memuat perincian transaksi, seperti *sales contract*, *letter of credit (L/C)*, *purchase order*, perincian barang, harga barang detail pengapalan, dokumen lainnya yang disertakan
 - b. *Insurance Document* yaitu dokumen yang menyatakan jaminan asuransi terhadap barang yang dikapalkan. Dokumen asuransi ini bisa diterbitkan oleh eksportir ataupun importir sesuai dengan ketentuan *sales contract*.
 - c. *Inspection Certificate* yaitu dokumen yang menunjukkan hasil pemeriksaan barang oleh surveyor atas barang yang akan dikapalkan. Perusahaan di Indonesia yang biasa digunakan untuk melakukan inspeksi adalah P.T. Succopindo atau P.T. Surveyor Indonesia.
 - d. *Certificate of Analysis* yaitu dokumen yang menunjukkan hasil pemeriksaan barang oleh surveyor atas barang yang akan dikapalkan yang merinci kandungan komposisi dan campuran terhadap yang membentuk barang.
 - e. *Packing List* yaitu dokumen yang menunjukkan cara pembungkusan, materi pembungkus, perincian barang yang dibungkus, *marking*, dan *labelling* dari barang.
3. *Official Documents* yaitu dokumen yang diperlukan untuk melewati kantor beacukai/pabean (*custom gate*) baik dalam rangka ekspor maupun impor. Beberapa dokumen yang terkait dengan official documents adalah
 - a. *Import/Export License* yaitu izin impor atau ekspor yang harus ditunjukkan ke kantor beacukai
 - b. *Consular Invoice* adalah invoice yang dibuat di atas formulir invoice yang disediakan di kedutaan negara importir dan berdasarkan peraturan impor di negara importir
 - c. *Certificate of Origin* adalah dokumen yang menunjukkan atau membuktikan asal barang
 - d. *Surveyor's Report* adalah dokumen yang menunjukkan hasil pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan surveyor.

- e. *Import Declaration* adalah dokumen pernyataan yang dibuat oleh importir yang diperlukan untuk pengeluaran barang dari wilayah pabean khususnya untuk penghitungan bea masuk/pajak impor dan sebagainya
 - f. *Export Declaration* adalah dokumen pernyataan yang dibuat oleh eksportir yang diperlukan untuk pemasukan barang ke wilayah pabean untuk ekspor khususnya dipergunakan untuk menghitung besarnya bea-keluar atau pajak ekspor
4. *Financial Documents* adalah dokumen keuangan yang dipergunakan dalam transaksi ekspor. Dokumen ini dapat berupa perintah membayar atau janji untuk membayar. Yang termasuk dalam dokumen ini adalah:
- a. *Bills of Exchange* atau draft atau wesel adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir sebagai penjual kepada importir sebagai pembeli dengan maksud agar importir membayar sejumlah uang seperti yang telah disepakati dalam *sales contract*.
 - b. *Promissory Notes* adalah dokumen yang menyatakan janji importir untuk membayar kepada eksportir sejumlah uang seperti dipersyaratkan dalam *sales contract*.



Gambar 5. Proses Negosiasi Letter of Credit antara Eksportir dan Importir (Agoes Moerjono, 1993)

Setelah seluruh dokumen diselesaikan, maka proses ekspor pun dapat segera dilakukan. Hanya saja, salah satu kesulitan dalam ekspor impor adalah kendala keuangan. Kendala keuangan menjadi salah satu hambata perusahaan untuk melakukan ekspor-impor. Namun, dengan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh bank maka kendala keuangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, bagaimana proses eksportir dan importir melakukan transaksi melalui fasilitas L/C dari perbankan dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar tersebut menjelaskan proses perusahaan eksportir dan

importir dalam melakukan transaksi dengan menggunakan fasilitas L/C. Ada beberapa pelaku yang terlibat dalam proses penggunaan fasilitas L/C, yaitu importir, eksportir, issuing bank, dan advising bank.

Adapun penjelasan dari ilustrasi di atas dalam rangka memperoleh L/C dari pihak perbankan adalah sebagai berikut:

1. Sales Contract (S.C) di mana eksportir dan importir menandatangani sales contract dengan ketentuan pembayaran dengan L/C
2. Letter of Credit Application diajukan oleh importir sesuai dengan ketentuan sales contract kepada Issuing Bank
3. Issuing Bank adalah bank yang membuka L/C importir yang menjadi bank penjamin pembayaran barang yang diimpor
4. Advising Bank adalah bank koresponden Issuing Bank di negara/kota Eksportir yang bertindak untuk menyampaikan L/C dari Issuing Bank kepada eksportir
5. Goods/Barang akan dikirim oleh eksportir sesuai dengan sales contract kepada pihak pengangkut barang di pelabuhan pemberangkatan apabila L/C sudah diterima oleh eksportir
6. Pihak pengangkut barang atau perusahaan ekspedisi (*Carrier*) yang mengangkut barang menuju pelabuhan tujuan
7. *Carrier* menyerahkan Bill of Lading kepada eksportir sebagai bukti atau dokumen transportasi (transport document)
8. Export documents. Setelah eksportir menerima Bill of Lading dan melengkapinya dengan berbagai dokumen sesuai ketentuan L/C dan menyerahkan dokumen ekspor tersebut kepada Negotiation Bank. Mengingat L/C termasuk jenis Free Negotiation, maka eksportir dapat meminta realisasi L/C kepada Bank Devisa (yaitu Bank dapat melakukan transaksi dengan luar negeri) yang menjadi koresponden dari Issuing Bank dan bersedia melakukan negosiasi
9. Setelah memeriksa dokumen ekspor, maka Negotiation Bank dapat merealisasikan L/C dalam bentuk uang (dollar)
10. Setelah menerima dokumen ekspor dari eksportir, maka pihak Negotiation Bank akan mengirim dokumen ekspor tersebut kepada Issuing Bank untuk melakukan claim reimbursement meminta pembayaran sebagai ganti realisasi L/C kepada eksportir
11. Issuing Bank melakukan pemeriksaan terhadap dokumen ekspor yang dikirim oleh Negotiation Bank dan bila dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan L/C, maka Issuing Bank akan melakukan pembayaran kepada Negotiation Bank
12. Selanjutnya Issuing Bank meminta kepada importir untuk menebus ekspor dokumen
13. Importir membayar ekspor dokumen dan menerima penyerahan dokumen ekspor
14. Bill of Lading dipergunakan oleh importir untuk mengklaim barang dari gudang *Carrier/Perusahaan Pengangkut* di pelabuhan tujuan (*port of destination*)

Berdasarkan ilustrasi di atas jelaslah bahwa pola perdagangan internasional melalui sistem ekspor impor harus melalui beberapa proses dan disertai dengan dokumen-dokumen perdagangan. Ilustrasi di atas merupakan salah satu pola ekspor impor dari berbagai pola yang ada dalam sistem ekspor impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Firman.** 2001. Peran Subsektor Peternakan Dalam Struktur Perekonomian Indonesia (Analisis Input-Output). Program Pascasarjana Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Agoes Moerjono. 1993. Melangkah Menuju Ekspor. Penerbit Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Jakarta.
- Caves, E. Richard, Jeffrey A. Frankel, and Ronald W. Jones. 1993. *World Trade and Payments: An Introduction*. Sixth Edition. Harper Collins Collage Publisher. New York.
- Hadiwiardjo H. Bambang. 1997. ISO 14001 Panduan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hadiwiardjo H. Bambang dan Sulistjarningsih Wibisono. 1996. Memasuki Pasar Internasional dengan ISO 9000 Sistem Manajemen Mutu. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Isang Gonarsyah. 2001. Strategi Pengembangan Pusat-pusat Perekonomian Daerah Dalam Perspektif Basis Pasar Internasional. Makalah Lokakarya Nasional Strategi Pemberdayaan dan Optimalisasi Otonomi Daerah Sebagai Basis Pasar Internasional. Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB. Bogor.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan dan Kosmetik (LP.POM-MUI). 2000. Jurnal Halal Menentramkan Umat. No. 33/Agustus/2000. LP.POM-MUI. Bogor.
- Salvator, Dominick. 1995. Ekonomi Internasional. Edisi Kedua Penerbit Erlangga. Jakarta
- Sharples, Jerry A., 1990. *Cost of Production in Analyzing Trade and Competitiveness*. American Journal of Agricultural Economics 72(5). USA